



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU ANGGOTA TENTARA NASIONAL
INDONESIA ATAU ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
ATAU PEJABAT NEGARA ATAU PENSIUNANNYA**

NOMOR : 00/2735495

☐ Pembetulan Ke

☐ Pembatalan

1721 - A2

MASA PEROLEHAN

0 1 - 1 2

TAHUN PEROLEHAN

2 0 2 5

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN

A.1 NPWP : 348374307409000
A.2 NIP/ NRP : 198505062009122005
A.3 NAMA : Umi Kulsum, SP
A.4 PANGKAT/ GOL : IV/b / Pembina Tk.I
A.5 NAMA JABATAN : Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Madya
A.6 JENIS KELAMIN : ☐ LAKI - LAKI ☐ PEREMPUAN
A.7 NIK : 3214014605850016
A.8 STATUS/JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP
TK / 2

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21

URAIAN		JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK : ☐ 21-100-01 ☐ 21-100-02		
PENGHASILAN BRUTO		
1.	GAJI POKOK / PENSIUN	58.877.900
2.	TUNJANGAN ISTRI	0
3.	TUNJANGAN ANAK	2.355.116
4.	TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN	0
5.	TUNJANGAN STRUKTURAL / FUNGSIONAL	15.960.000
6.	TUNJANGAN BERAS	3.041.640
7.	TUNJANGAN LAIN-LAIN	673
8.	PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI GAJI	122.084.095
9.	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.D. 8)	202.319.424
PENGURANG		
10.	BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIUN	6.000.000
11.	IURAN PENSIUN ATAU IURAN THT	2.496.439
12.	ZAKAT/SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB YANG DIBAYARKAN MELALUI PEMBERI KERJA	0
13.	JUMLAH PENGURANGAN (10 S.D. 12)	8.496.439
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21		
14.	JUMLAH PENGHASILAN NETO (9 - 13)	193.822.985
15.	PENGHASILAN NETO MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DARI PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
16.	JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN / DISETAHUNKAN)	193.822.985
17.	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	63.000.000
18.	PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (16-17)	130.822.000
19.	PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	13.623.299
20.	PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU YANG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
21.	PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
22.	PPh PASAL 21 TERUTANG YANG DAPAT DIKREDITKAN PADA SPT TAHUNAN (19-20-21)	13.623.299
23.	PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI PADA SELAIN MASA PAJAK TERAKHIR	12.125.592
	23a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	23b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	12.125.592
24.	PPh PASAL 21 KURANG BAYAR / LEBIH BAYAR MASA PAJAK TERAKHIR	1.497.707
	24a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	24b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	1.497.707

C. PEGAWAI TERSEBUT C.01 ☐ DIPINDAHKAN C.02 ☐ PINDAHAN C.03 ☐ BARU C.04 ☐ PENSIUN

D. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK

D.1 NPWP Instansi Pemerintah : 000148965017000
D.2 Nama Instansi Pemerintah : SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN
D.3 ID Sub Unit Organisasi : 451005
D.4 Tanggal : 3 1 dd 1 2 mm 2 0 2 5 yyyy
D.5 NAMA PENANDATANGAN : Denny Hariman Ritonga, S.Sos
D.6 Pernyataan Wajib Pajak : Dengan ini saya menyatakan bahwa Bukti Pemotongan Pajak telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangi secara elektronik



Sesuai dengan ketentuan yang berlaku Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA

Direktorat Jenderal Pajak

Layanan Informasi & Pengaduan: (021) 1500200

info@djppajak.go.id pengaduan@djppajak.go.id

BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK (BPE)

Nomor BPE : **BPE-19038/CT/KPP.0910/2026**

Tanggal : 26 Februari 2026

NPWP : 3214014605850016

Nama Wajib Pajak: UMI KULSUM

Jenis SPT : SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang
Pribadi

Tahun Pajak : 2025

Masa Pajak : Januari - Desember 2025

Status SPT : Normal

Saluran : Portal Wajib Pajak

Tanggal Terima
SPT : 26 Februari 2026

Dokumen ini diterbitkan secara elektronik oleh Coretax DJP dan sah
sebagai Bukti Penerimaan Elektronik. Tidak memerlukan tanda tangan
basah.